

**RELASI EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF DALAM PROSES  
PENYUSUNAN PERDA TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DI  
KABUPATEN TRENGGALEK**

**SKRIPSI**

Di ajukan untuk Memenuhi  
Persyaratan Guna Meraih Gelar Sarjana Strata 1 (S1) Ilmu Pemerintahan  
Universitas Muhammadiyah Malang



**Disusun Oleh:**

Yeni Nurlanda

202010050311064

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**2024**

RELASI EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF DALAM PROSES PENYUSUNAN PERDA  
TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KABUPATEN TRENGGALEK

Diajukan Oleh:

Yeni Nurlanda  
202010050311064


Telah disetujui

Pada hari / tanggal, *Rabu / 19 Juni 2024*

Ka. Prodi Ilmu Pemerintahan

Pembimbing

  
Muhammad Kamil, S.IP., M.A

  
Muhammad Kamil, S.IP., M.A

Mengetahui

Wakil Dekan I FISIP UMM

  
Nasrullah, S.IP., M.Hub.Int



# SKRIPSI

Dipersiapkan dan disusun oleh:




**YENI NURLANDA**  
**202010050311064**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi  
dan dinyatakan  
**LULUS**

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar  
Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan  
Pada hari Rabu, 19 Juni 2024  
Dihadapan Dewan Penguji

Dewan Penguji:

1. Prof. Dr. Asep Nurjaman, M.Si
2. Iradhad Taqwa Sihidi, M.A
3. Muhammad Kamil, S.IP., M.A

()  
()  
()

Mengetahui  
Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

  
Najamul Huda, S.IP., M.Hub.Int



UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH  
MALANG

# FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

fisip.umm.ac.id | fisip@umm.ac.id

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Yeni Nurlanda  
NIM : 202010050311064  
Jurusan : Ilmu Pemerintahan  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Malang

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa

1. Tugas Akhir dengan Judul:  
Relasi Eksekutif dan Legislatif Dalam Proses Penyusunan Perda Tentang Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Trenggalek adalah hasil karya saya, dan dalam naskah tugas akhir ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian ataupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka
2. Apabila ternyata di dalam naskah tugas akhir ini dapat dibuktikan terdapat unsur- unsur PLAGIASI, saya bersedia TUGAS AKHIR INI DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tugas akhir ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

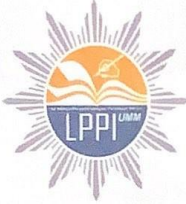
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 23 April 2024  
Yang Menyatakan,



Yeni Nurlanda





**LEMBAGA PENGEMBANGAN PUBLIKASI ILMIAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

Kampus III – Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang 65144  
Telp. (0341) 460435 Ext. 243 E-mail: lppi@umm.ac.id

**SURAT KETERANGAN CEK PLAGIASI  
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**Berdasarkan** peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2017 tentang pelaksanaan Deteksi Plagiasi pada karya Ilmiah Mahasiswa **di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Malang. Telah dilakukan cek orisinalitas karya ilmiah mahasiswa berikut:**

**Nama** : Yeni Nurlanda  
**NIM** : 202010050311064  
**Judul TA/Skripsi** : Relasi Eksekutif dan Legislatif Dalam Proses Penyusunan Perda Tentang Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Trenggalek  
**Pembimbing** : Muhammad Kamil, S.IP., MA.

**Setelah dilakukan cek orisinalitas karya, maka dengan ini menerangkan mahasiswa berikut** telah memenuhi syarat untuk mengikuti Ujian Skripsi **pada Program Studi Ilmu Pemerintahan dengan hasil sebagai berikut:**

No	Bab I	Bab II	Bab III	Bab IV	Bab V
1	1%	4%	6%	0%	2%

**Administrator,**

Muhammad Iqbal, S. Pd



**Malang, 24 April 2024**  
**Ka. Prodi Ilmu Pemerintahan**

Muhammad Kamil, S.IP., MA

## ABSTRAK

Terdapat isu gender yang masih menjadi masalah utama dalam pembangunan di Kabupaten Trenggalek, selain itu erdapat kesenjangan kedudukan dan peranan perempuan, penyandang disabilitas, lansia, dan anak-anak dalam program pembangunan, misalnya dalam bidang pendidikan, pekerjaan, kesehatan, maupun pemanfaatan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui relasi antara eksekutif dan legislatif dalam proses penyusunan Perda Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Trenggalek. Penelitian ini akan menggambarkan bagaimana relasi antara eksekutif dan legislatif dalam proses penyusunan Perda Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Trenggalek menggunakan alat analisis model teori relasi menurut *Stone* yang melihat sebuah relasi berdasarkan kerangka proses asosiatif dan disosiatif yang terjadi, yaitu melalui *anticipated reaction*, *non-decision making*, dan *systemic*. Metode penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif yang pemaparan hasilnya berupa narasi dari perolehan data melalui wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitan ini kedua relasi antara lembaga eksekutif dan legislatif memperhatikan garis koordinatif secara seimbang tidak saling mengintervensi dalam bekerjasama sehingga tidak memicu adanya koflik kepentingan antara kedua pihak. Dan pembentukan Perda Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Trenggalek pihak eksekutif mengajukan rancangan kepada pihak legislatif karena terdapat tuntutan dan upaya peningkatan IPG sebagai indikator pembangunan inklusif di Kabupaten Trenggalek serta untuk mencapai kesetaraan gender dan sebagai payung hukum bagi perempuan, disabilitas, lansia, dan anak-anak.

**Kata Kunci:** Relasi, Pengarusutamaan Gender, Peraturan Daerah

## ABSTRACT

*There are gender issues that are still a major problem in development in Trenggalek Regency, besides that there are gaps in the position and role of women, people with disabilities, the elderly, vulnerable people in development programs, for example in the fields of education, employment, health, and utilization, science and technology. This study aims to determine the relationship between the executive and legislative branches in the process of drafting the Gender Mainstreaming Regional Regulation in Trenggalek Regency. This research will describe how the relationship between the executive and the legislature in the process of drafting the Gender Mainstreaming Regional Regulation in Trenggalek Regency using the analytical tool of the relationship theory model according to Stone who sees a relationship based on the framework of associative and dissociative processes that occur, namely through anticipated reaction, non-decision making, and systemic. This research method is descriptive qualitative in which the results are presented in the form of narratives from the acquisition of data through interviews and documentation. Based on the results of this research, the two relations between the executive and legislative institutions pay attention to the coordinative line in a balanced manner, not intervening in cooperation so as not to trigger a conflict of interest between the two parties. And the formation of the Gender Mainstreaming Regional Regulation in Trenggalek Regency, the executive submitted a draft to the legislature because there were demands and efforts to increase IPG as an indicator of inclusive development in Trenggalek Regency and to achieve gender equality and as a legal umbrella for women, disabilities, elderly, and children.*

**Keywords:** *Relations, Gender Mainstreaming, Local Regulation*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, Segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, rahmat, dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan penyusunan penulisan skripsi ini dengan judul **“RELASI EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF DALAM PROSES PENYUSUNAN PERDA TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KABUPATEN TRENGGALEK.”** Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan manusia dari jalan kegelapan menuju ke jalan terang benderang.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.IP) Fakultas Ilmu Sosial dan Fakultas Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang. Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyusunan penulisan skripsi ini. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Nazaruddin Malik, SE., M.Si. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang
2. Bapak Prof. Dr. Muslimin Machmud, M.Si, Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang
3. Bapak Muhammad Kamil, S.IP.,MA. Selaku Ketua Prodi Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang.
4. Bapak Muhammad Kamil, S.IP.,MA. selaku Dosen Pembimbing yang sudah berkenan memberikan ilmu dan juga solusi untuk setiap permasalahan atau kesulitan dalam pembuatan tugas akhir ini.
5. Mohtrom S. Sos selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Trenggalek yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir.
6. Pegawai di Sekretariat DPRD Kabupaten Trenggalek yang berkenan memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.



7. Ayah dan Ibu tercinta, dua orang yang sangat berjasa dalam hidup penulis. Terimakasih atas doa, cinta, kepercayaan dan segala bentuk yang telah diberikan. Sehingga penulis merasa terdukung disegala pilihan dan keputusan yang diambil oleh penulis. Serta tanpa lelah mendengar keluh kesah penulis hingga dititik ini.
8. Kepada kedua saudara saya yang telah memberikan semangat tanpa henti, menjadi pendengar yang setia bagi penulis, serta memberikan saran selama penulisan tugas akhir ini.
9. Kepada pihak yang tidak dapat saya sebutkan, terimakasih telah menemani dan memberikan semangat dipenghujung perjalanan saya menuju cita-cita. Walau tidak dapat dipungkiri terkadang rasa sedih kerap kali datang dan menjadi kendala tersendiri.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna hal ini karena terbatasnya pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh penulis. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan adanya saran dan masukan yang membangun dari berbagai pihak. Semoga penulisan skripsi ini bisa bermanfaat bagi para pembaca dan pihak-pihak khususnya dalam bidang pemerintahan.

Malang, 18 Juni 2024

Penulis

Yeni Nurlanda

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR SERTIFIKAT PLAGIASI .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	17
1.3 Tujuan Penelitian.....	17
1.4 Manfaat Penelitian.....	17
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	17
1.4.1 Manfaat praktis .....	17
1.5 Definisi Konseptual .....	18
1.5.1 Relasi Kekuasaan.....	18
1.5.2 Sistem Politik .....	18
1.5.3 Proses politik.....	19
1.5.4 Pengarusutamaan Gender.....	19
1.6 Definisi Operasional .....	20
1.7 Metode Penelitian .....	21
1.7.1 Jenis Penelitian.....	21

1.7.2	Sumber Data.....	21
1.7.3	Teknik Pengumpulan Data.....	22
1.7.4	Teknik Analisis Data .....	23
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>		<b>25</b>
2.1	Penelitian Terdahulu.....	25
2.2	Kerangka Teori.....	32
2.2.1	Konsep Relasi .....	32
2.2.2	Sistem Politik .....	34
2.2.3	Proses Politik .....	36
2.2.4	Pengarusutamaan Gender .....	37
<b>BAB III DESKRIPSI WILAYAH .....</b>		<b>41</b>
3.1	Deskripsi Umum Kabupaten Trenggalek .....	41
3.1.1	Demografi.....	42
3.1.2	Perekonomian Daerah .....	43
3.1.3	Data Ruang Wilayah .....	45
3.2	Profil Sekretariat DPRD Kabupaten Trenggalek .....	45
3.2.1	Visi dan Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Trenggalek .....	46
3.2.2	Tujuan Sekretariat DPRD Kabupaten Trenggalek .....	48
3.2.3	Struktur Organisasi DPRD Kabupaten Trenggalek .....	48
<b>BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA.....</b>		<b>50</b>
4.1	Tuntutan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Trenggalek.....	50
4.2	Perencanaan Peraturan Daerah pengarusutamaan gender di Kabupaten Trenggalek. ....	60
4.3	Relasi Eksekutif dan Legislatif Dalam Proses Penyusunan Perda.....	67
4.4	Proses penyusunan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2023 Tentang Pengarusutamaan Gender .....	74



<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>86</b>
5.1 Kesimpulan .....	86
5.2 Saran .....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>88</b>



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Model Teori Sistem Politik David Easton .....	35
Gambar 3. 1 Peta Kabupaten trenggalek.....	42
Gambar 3. 2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Trenggalek .....	44
Gambar 3. 3 Tampak Depan Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Trenggalek ..	46
Gambar 3. 4 Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Trenggalek .....	49
Gambar 4. 1 Proes Penyusunan PERDA No. 2 Tahun 2023 Tentang Pengarusutamaan Gender Kabupaten Trenggalek.....	76



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Trenggalek .....	2
Tabel 1. 2 Jumlah DPRD Kabupaten Trenggalek Berdasarkan Jenis Kelamin .....	3
Tabel 1. 3 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Trenggalek tahun 2019-2021.....	4
Tabel 1. 4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Trenggalek .....	5
Tabel 1. 5 Data Penyandang Disabilitas Pada Tahun 2023.....	6
Tabel 1. 6 Data Lansia Terlantar Pada Tahun 2023 .....	7
Tabel 1. 7 Data Anak-anak Terlantar Pada Tahun 2023.....	7
Tabel 1. 8 Tabel Wawancara.....	23
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	25
Tabel 3. 1 Jumlah Penduduk Kabupaten Trenggalek.....	43
Tabel 4. 1 Jumlah Ketenagakerjaan Kabupaten Trenggalek 2022.....	51
Tabel 4. 2 Jenis Kejahatan di Kabupaten Trenggalek 2022.....	54
Tabel 4. 3 Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Trenggalek Tahun 2022-2023 .....	56
Tabel 4. 4 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Tahun 2021-2022.....	57
Tabel 4. 5 Klasifikasi Indeks Pembangunan Tahun 2021-2022.....	58
Tabel 4. 6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Trenggalek Menurut Dimensi Penyusunannya .....	75
Tabel 4. 7 Pihak Yang Terlibat dalam Penyusunan Perda Pengarusutamaan Gender .....	80



## DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, I., & Sopiany, H. M. (2021). *Optimalisasi Kinerja DPRD dalam Pembentukan Peraturan Daerah*.
- Akademik, N., Perwakilan, D., Daerah, R., & Tengah, P. J. (2021). *Pengarusutamaan Gender Provinsi Jawa Tengah*.
- Alfin Zakaria. (2021). *Kinerja Anggota Legislatif Sampang Periode 2014-2019 dalam Menginisiasi Peraturan Daerah Pemberdayaan Perempuan (Studi Analisis Gender dan Politik)*. Vol 1(2), 78–91.
- Anggara, S. (2015). Sistem Politik Indonesia. In *Sistem Politik Indonesia*.
- Ballian Siregar, Veranus Sidharta, W. M. A. (2020). *Pengarusutamaan Gender: Studi Kasus Jurnal Perempuan Metro TV*. 1(2), 24–31.
- BPS. (2022). *Kabupaten Trenggalek Dalam Angka 2022*.
- Brilliant, C., Tawakkal, G. T. I., & Rohman, A. Z. F. (2022). Kelembagaan Sosiologis Terkait Ketiadaan Politikus Perempuan Partai Keadilan Sejahtera di DPRD Kabupaten Trenggalek. *Sospol: Jurnal Sosial Politik*, 8(2), 183–196. <https://doi.org/10.22219/jurnalsospol.v8i2.23304>
- Jainuri, S. (2014). Negara Versus Masyarakat Sipil di Aras Lokal (Perlawanan Masyarakat Sipil Terhadap Negara dalam Penyusunan Kebijakan APBD dan Perubahan Pasar Tradisional Menjadi Pasar Modern di Kota Malang). In *Litera* (Vol. 1, Issue 1).
- Maharani, S. M., Suaib, E., & Nasir, M. (2020). *Studi Hubungan Legislatif-Eksekutif Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Di Provinsi Sulawesi Tenggara Pada Tahun 2018*. 22–33.
- PemProv Lampung. (2019). *Naskah Akademik Perda Pengarusutamaan Gender*. 1–80.
- Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender PProvinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024*. (2020).
- Raharjo, P., & Rahman, Z. I. (2022). Pola Hubungan Legislatif Dan Eksekutif Kaitannya Terhadap Fungsi Legislasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. *PUBLIKA Jurnal Ilmiah Administrasi Dan Kebijakan Publik*, 8(1), 1–10.
- Ramadhani, E. T. (2018). Proses Politik dalam Upaya Pemekaran Daerah

- Kabupaten Berau Pesisir Selatan. (*Doctoral Dissertation, University of Muhammadiyah Malang*, 23, 8–9.
- Risnawan, W. (2017). Peran Dan Fungsi Infrastruktur Politik Dalam Pembentukan Kebijakan Publik. *Dinamika Administrasi Publik*, 4(3), 511–518. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/view/1952/1588>
- Santosa, W. M. (2016). *Penelitian dan Pengarusutamaan Gender: Sebuah Pengantar*.
- Suparlan, P. (2014). Konflik Sosial dan Alternatif Pemecahannya. *Antropologi Indonesia*, 30(2), 138–150. <https://doi.org/10.7454/ai.v30i2.3559>
- Susanto, J., & Andriyanto, A. (2023). Implementasi Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan. ... *Kebijakan*, 1(1), 13–20. <https://kolaboratif.pelantarpress.co.id/index.php/Kolaboratif/article/view/9%0Ahttps://kolaboratif.pelantarpress.co.id/index.php/Kolaboratif/article/download/9/5>
- Telaumbanua, D. (2018). Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota. *Jurnal Education and Development*, Vol. 4(1), 96–103.
- Wiasti, N. M. (n.d.). *Mencermati Permasalahan Gender dan Pengarusutamaan Gender ( PUG )*. 29–42.
- Afifah, I., & Sopiany, H. M. (2021). *Optimalisasi Kinerja DPRD dalam Pembentukan Peraturan Daerah*.
- Ahmad, Ulfa Widayati, J. (2023). *Pelaksanaan Hubungan Kewenangan Antara Legislatif Dan Eksekutif Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kabupaten Bima*. 1(2).
- Alfin Zakaria. (2021). *Kinerja Anggota Legislatif Sampang Periode 2014-2019 dalam Menginisiasi Peraturan Daerah Pemberdayaan Perempuan (Studi Analisis Gender dan Politik)*. Vol 1(2), 78–91.
- Amira Kenap Dientje Rumimpunu, C. A. G. (2021). *PROSES PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH MENJADI PERATURAN DAERAH*. IX(3), 78–88.
- Anggie Parawitha Lucca. (2022). Pola Hubungan Eksekutif - Legislatif Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2020. *Journal Publicuho*, 5(3), 591–601.

<https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.12>

- Astutik Supraptini. (2021). *Program SEPEDA KEREN Upaya Memperkuat Pembangunan Desa yang Inklusif*.
- Ballian Siregar, Veranus Sidharta, W. M. A. (2020). *Pengarusutamaan Gender: Studi Kasus Jurnalis Perempuan Metro TV*. 1(2), 24–31.
- BPS. (2022). *Kabupaten Trenggalek Dalam Angka 2022*.
- Kaisupy, F. A., Tuanaya, W., & Wance, M. (2020). Peran Anggota Legislatif Dalam Pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(2), 410–435.  
<https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/3411>
- Kamaludin, K., Arman, A., & Dunggio, S. (2022). Analisis Sinergi Eksekutif Dan Legislatif Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Tentang APBD Di Kabupaten Kolaka Utara. *Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi*, 1(1), 01–17. <https://doi.org/10.59713/jipik.v1i1.16>
- Karey, W. H., & Malatuny, Y. G. (2023). DINAMIKA INTERAKSI POLITIK:(Mengurai Proyeksi Pembuatan APBD dan RANPERDA di Kabupaten Maluku Barat Daya). *Civics Education and Social ...*, 5, 26–38.  
<http://journal.univetbantara.ac.id/index.php/cessj/article/view/3861>
- Lule, A. (2019). DINAMIKA INTERAKSI LEGISLATIF DAN EKSEKUTIF DI PULAU MOROTAI (Mengurai Konfigurasi Politik dan Penjelasan Alternatif). *Jurnal Academia Praja*, 2(02), 1–20.  
<https://doi.org/10.36859/jap.v2i02.115>
- Maharani, S. M., Suaib, E., & Nasir, M. (2020). *Studi Hubungan Legislatif-Eksekutif Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ( APBD ) Di Provinsi Sulawesi Tenggara Pada Tahun 2018*. 22–33.
- Marince, Y. (n.d.). *Pengurusutamaan Gender Dalam Kehidupan Politik di Indonesia*.
- Melani, R., & Putri, N. E. (2021). Fungsi DPRD dalam Penyusunan Ranperda Periode 2014-2019 di DPRD Kabupaten Limapuluh Kota. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 5(4), 1168–1175.  
<https://doi.org/10.58258/jisip.v5i4.2502>
- Prayudi. (2019). *Hubungan DPRD Dan Kepala Daerah: Studi Penggunaan*



*Mekanisme Konsultasi Pembuatan Kebijakan Daerah*. 205–222.

Raharjo, P., & Rahman, Z. I. (2022). Pola Hubungan Legislatif Dan Eksekutif Kaitannya Terhadap Fungsi Legislasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. *PUBLIKA Jurnal Ilmiah Administrasi Dan Kebijakan Publik*, 8(1), 1–10.

Sekar Panuluh, & Fitri, M. R. (2015). Perkembangan Pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia. *International NGO Forum on Indonesian Development*, 2(September), 1–25.

[https://www.sdg2030indonesia.org/an-component/media/upload-book/Briefing\\_paper\\_No\\_1\\_SDGS\\_-2016-Meila\\_Sekar.pdf](https://www.sdg2030indonesia.org/an-component/media/upload-book/Briefing_paper_No_1_SDGS_-2016-Meila_Sekar.pdf)

Sitorus, A. V. Y. (2016). Dampak Ketimpangan Gender terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (The Impact of Gender Inequality in Economic Growth in Indonesia). *Sosio Informa*, 2(1), 89–101.

<https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/viewFile/190/440>

Susanto, J., & Andriyanto, A. (2023). Implementasi Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan. ... *Kebijakan*, 1(1), 13–20.

<https://kolaboratif.pelantarpress.co.id/index.php/Kolaboratif/article/view/9%0Ahttps://kolaboratif.pelantarpress.co.id/index.php/Kolaboratif/article/download/9/5>

Wiasti, N. M. (n.d.). *Mencermati Permasalahan Gender dan Pengarusutamaan Gender ( PUG )*. 29–42.

Yasmin, Y. F., & Erowati, D. (2019). Peran Anggota Legislatif Perempuan Di Dprd Kabupaten Kebumen Periode 2014 – 2019 (Studi Kasus: Penyusunan Perda Pemberian ASI Eksklusif). *Journal of Political and Government*, 8(4), 321–330.